

# PENYELAMATAN ARSIP INFRASTRUKTUR; REKAM JEJAK DARI KERJA PEMERINTAHAN JOKOWI-JK

**B**angsa Indonesia adalah bangsa yang besar', kalimat ini acapkali kita dengar dalam berbagai kesempatan. Kebesaran bangsa Indonesia tidak hanya disuguhkan dalam skala geografis dan demografis, tetapi juga fakta sejarah perjuangan bangsa yang memperlihatkan bangsa Indonesia tetap bersatu hingga kini dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbhineka tunggal ika.

Untuk memenuhi janji kemerdekaan, maka pemerintahan Jokowi-JK bertekad menjaga kedaulatan negara, baik itu laut, perbatasan, maupun sumber daya alam. Ini terlihat dalam tahun pertama Kabinet Kerja, dimana pemerintah telah meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh melalui transformasi fundamental perekonomian dan meletakkan kembali paradigma Indonesia Sentris.

Pada tahun kedua, pemerintah mendorong percepatan pembangunan nasional, meliputi pembangunan infrastruktur fisik, mempercepat pembangunan sumber daya manusia, serta meningkatkan daya saing untuk mengejar ketertinggalan dengan negara lain. Pada tahun ketiga, fokus pada kebijakan pemerataan ekonomi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya membangun Indonesia sentris dijabarkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur transportasi untuk memperlancar konektivitas yang menghubungkan setiap jengkal wilayah Nusantara. 'Kita ingin seluruh wilayah Indonesia terhubung, baik melalui udara, laut, maupun darat' demikian pidato kenegaraan Presiden Jokowi pada tahun 2017, guna menjawab kenapa pembangunan infrastruktur transportasi digalakkan. Untuk itu Indonesia membangun

bandara perintis, pelabuhan, jalan paralel perbatasan dan jalan lintas perbatasan di Kalimantan, NTT dan Papua.

Adanya pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menggerakkan perekonomian daerah setempat, terutama di kawasan pinggiran dan perbatasan. Untuk itu, pemerintah terus mendorong pembangunan energi listrik di 31 lokasi prioritas dan meneruskan pembangunan berbagai *Base Transceiver Station* (BTS) sehingga perbatasan dan garis perbatasan NKRI dapat mengakses telepon dan informasi. Pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan merupakan suatu kebutuhan, hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat Indonesia terutama yang berkaitan dengan sarana transportasi. Adanya pembangunan transportasi diharapkan dapat mempermudah dan mempercepat perjalanan dan



Presiden Joko Widodo saat pidato kenegaraan di hadapan DPR RI dan DPD RI dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia (Dok. Humas ANRI)

peningkatan di bidang ekonomi dan bidang lainnya.

Pembangunan infrastruktur dilakukan untuk menekankan ketimpangan, bukan hanya soal ekonomi tetapi juga mempersatukan bangsa, demikian penjelasan Presiden Jokowi kenapa pembangunan infrastruktur digalakkan di era kepemimpinannya. Ditambahkan, bahwa ditargetkan 14 kawasan industri baru terbangun di luar Pulau Jawa akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru sehingga bangsa Indonesia mampu memenangkan kompetensi antarnegara.

Tentunya, yang terpenting dari adanya pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Kabinet Kerja harus terdokumentasikan, dapat dikelola dan tersimpan dengan baik dan selanjutnya dapat diserahkan ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai bukti pertanggungjawaban nasional. Menurut Kepala ANRI, Dr. Mustari Irawan, MPA, arsip infrastruktur yang tercipta harus selalu dipantau dan dimonitoring termasuk pemberkasannya. Hal ini perlu dilakukan agar arsip infrastruktur tidak tercecer dan memberkas dengan baik

sehingga arsip tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kepentingan penelitian di masa depan.

Berbicara mengenai arsip infrastruktur, ANRI saat ini memiliki khazanah arsip pembangunan infrastruktur mulai jalan-jalan yang dibangun pada masa kolonial, seperti pembangunan sarana infrastruktur berupa jalan sepanjang 1.000 Km mulai dari Anyer (Jawa Barat, sekarang Banten) sampai dengan Panarukan (Jawa Timur) yang dilakukan pada masa Gubernur Jenderal Herman Willem Deandies (1808 – 1811). Arsip tersebut masih terkelola dan tersimpan dengan baik, diharapkan dapat sebagai rujukan untuk memprediksi pembangunan-pembangunan jalan berikutnya.

Dalam penjelasannya, Kepala ANRI berharap setiap instansi pemerintah yang menciptakan arsip infrastruktur harus mampu mengelolanya dengan baik sehingga arsip tersebut dapat dijadikan bukti pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan aktivitasnya kinerjanya. Untuk itulah ANRI tetap mendorong setiap instansi

pemerintah memberi peluang seluas-luasnya kepada karyawan yang telah mengkhususkan pekerjaannya di bidang kearsipan untuk menjadi Arsiparis. Keberadaannya diharapkan dapat membantu terkelolanya arsip-arsip infrastruktur secara akurat dan lengkap, demikian paparan dari Mustari Irawan. Namun diakui, untuk pengelolaan arsip infrastruktur yang bersifat dinamis memerlukan ekstra perhatian karena pendokumentasian tersebut tidak hanya menjadi kewajiban instansi pemerintah saja tetapi juga melibatkan pihak ketiga (BUMN ataupun perusahaan swasta).

Dalam Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, disebutkan Pihak Ketiga yang menerima pekerjaan dari lembaga negara, pemerintahan daerah, perguruan tinggi negeri, serta BUMN dan/atau BUMD berdasarkan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara kepada pemberi kerja. Itu artinya, pihak ketiga yang menerima pekerjaan infrastruktur pun wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pemberi kerja dan lembaga lain yang terkait, termasuk dalam pengelolaan arsipnya. Dalam Pasal 88 disebutkan pula, pihak ketiga yang tidak menyerahkan arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai dengan anggaran negara sebagaimana dimaksud Pasal 58 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah). Dengan demikian, sosialisasi tentang penyelamatan arsip infrastruktur hendaknya dilakukan terhadap pihak ketiga.

ANRI perlu melakukan pembinaan secara kontinu ke instansi-instansi

pemerintah dan pihak ketiga yang terlibat, terutama dalam hal pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan sehingga semua data arsip yang dikeluarkan oleh pemerintah khususnya yang terkait dengan pengelolaan arsip infrastruktur itu dapat dipercaya, valid dan akurat.

Informasi arsip infrastruktur meskipun tidak termasuk arsip terjaga, kiranya bagi instansi-instansi tertentu yang mempunyai tanggungjawab mengelola dan membangun infrastruktur dalam era pemerintahan Kabinet Kerja menjadi informasi yang strategis. Itu artinya arsip infrastruktur yang tercipta dari instansi pemerintah memainkan peran penting dalam mengantisipasi masalah-masalah pembangunan sarana dan prasarana.

Arsip infrastruktur yang akurat, lengkap, dan termutakhirkan jelas menjadi acuan sebelum dikeluarkannya suatu *policy* untuk melanjutkan pembangunan guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Keberadaannya merupakan bukti autentik, oleh karenanya pengelolaan terhadap arsip infrastruktur harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terintegrasi, dan satu sama lain saling melengkapi.

Berarti, upaya penyelamatan arsip infrastruktur merupakan cara untuk mendokumentasikan segala rekam jejak suatu kinerja yang dilakukan pada era pemerintahan Jokowi-JK. ANRI suatu lembaga pemerintah yang diberi kewenangan dan tanggungjawab sebagai penyelenggara kearsipan nasional yang meliputi penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip hendaknya mulai sekarang perlu memprioritaskan upaya penyelamatan arsip-arsip infrastruktur sebagai bentuk komitmen pemerintah

**“ arsip infrastruktur yang tercipta harus selalu dipantau dan dimonitoring termasuk pemberkasannya. Hal ini perlu dilakukan agar arsip infrastruktur tidak tercecer dan memberkas dengan baik sehingga arsip tersebut nantinya akan sangat berguna bagi kepentingan penelitian di masa depan ”**



Kepala ANRI, Mustari Irawan

terhadap penyelenggaraan kearsipan.

Dengan tersimpannya arsip mengenai pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh bangsa Indonesia diharapkan dapat memberikan harapan, semangat dan inspirasi bagi generasi berikutnya. Kepala ANRI, Mustari Irawan, menambahkan bahwa dengan tersimpannya arsip-arsip mengenai pembangunan infrastruktur dalam bentuk film, foto, dan *drawing* memberikan gambaran kepada kita semua, terutama generasi penerus bangsa, bahwa bangsa kita pada masa sekarang ini sesungguhnya

merupakan bangsa yang giat bekerja mengisi pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bangsa. Arsip-arsip ini akan menjaga memori, identitas bangsa dan menyampaikan informasi kepada masyarakat, arsip tersebut bukan hanya sekedar informasi, tetapi merupakan pengetahuan, arsip menjadi aset kekayaan bahan informasi juga ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat, ujar Mustari Irawan, yang saat ini sudah memasuki tahun kelima memimpin ANRI.

Di bawah kepemimpinannya, ANRI terus menggalakkan upaya Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (GNSTA) sebagai upaya membangun kesadaran semua elemen masyarakat terhadap pentingnya mengelola arsip. Arsip infrastruktur dengan segala kompleksitasnya merupakan arsip aset yang perlu diselamatkan dan dilestarikan, oleh sebab itu, salah satu target dari GNSTA ini adalah mendukung program/agenda Nawacita dari Pemerintahan Jokowi-JK yang sedang gencar-gencarnya melakukan pembangunan infrastruktur sebagai upaya menyelamatkan aset kekayaan intelektual bangsa untuk membangun industri strategis nasional.

Arsip infrastruktur sebagai salah satu aset bersejarah yang berisi informasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh suatu instansi baik itu di tingkat nasional maupun daerah bermakna bahwa arsip tersebut mempunyai potensi untuk dimanfaatkan pada masa yang akan datang, mampu menunjang peran dan fungsi pemerintahan sebagai pemberi layanan publik sehingga mendukung terciptanya *good governance* dan *open government*. (BPW)